



PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DI ERA DIGITAL



**Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si - H. Asep Nurwanda, S.HI., M.Si
Arie Budiawan, S.IP., M.M - Agus Nurulsyam Suparman, S.IP., M.Si
Asep Nurdin Rosihan Anwar, S.IP., M.Si - Fachmi Syam Arifin, S.IP., M.IP**

**PERAN PEMERINTAH DALAM
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG CERDAS DI ERA DIGITAL**

PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DI ERA DIGITAL

Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si
H. Asep Nurwanda, S.HI., M.Si
Arie Budiawan, S.IP., M.M
Agus Nurulsyam Suparman, S.IP., M.Si
Asep Nurdin Rosihan Anwar, S.IP., M.Si
Fachmi Syam Arifin, S.IP., M.IP



PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DI ERA DIGITAL

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si
H. Asep Nurwanda, S.HI., M.Si
Arie Budiawan, S.IP., M.M
Agus Nurulsyam Suparman, S.IP., M.Si
Asep Nurdin Rosihan Anwar, S.IP., M.Si
Fachmi Syam Arifin, S.IP., M.IP

Editor: Rusli

Terbitan: Agustus 2024

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
Dimensi : 18,2 x 25,7 cm

ISBN 978-623-8750-07-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, kami mempersembahkan buku ini kepada para pembaca, yang kami harapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang topik yang sangat relevan di era digital saat ini. Buku ini berjudul *"Peran Pemerintah dalam Menghadirkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dalam Era Digital"*.

Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat dan transformasi digital yang merambah hampir semua aspek kehidupan, tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya terampil, tetapi juga cerdas dan adaptif terhadap perubahan. Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan nasional, memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya ini.

Buku ini bertujuan untuk menguraikan berbagai peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan SDM yang unggul. Dari kebijakan pendidikan yang adaptif hingga inisiatif pelatihan dan pengembangan keterampilan digital, buku ini mengeksplorasi berbagai strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya siap menghadapi tantangan, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital.

Dalam buku ini, Anda akan menemukan analisis mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, studi kasus yang memberikan gambaran nyata tentang implementasi strategi, serta rekomendasi yang relevan untuk kebijakan masa depan. Kami juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses ini dan bagaimana cara mengatasinya agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif yang maksimal.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang peran penting pemerintah dalam

membentuk SDM yang cerdas di era digital. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan mendorong langkah-langkah konstruktif dalam meningkatkan kualitas SDM kita untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk menyimak dan mendalami isinya. Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi acuan dalam upaya kita bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Selamat membaca,

Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I OPTIMALISASI KEBIJAKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN KOTA CERDAS	1
BAB II TRANSFORMASI PERKOTAAN KE ERA INDUSTRI 4.0	10
BAB III MEMBANGUN SMART PEOPLE UNTUK SMART CITY.....	17
BAB IV TANTANGAN IMPLEMENTASI SMART GOVERNMENT DI DESA SUKAJADI.....	24
BAB V OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA DAERAH MELALUI KONSEP SMART ECONOMY	35
BAB VI URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI.....	41
BAB VIII UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI STRATEGI SMART ECONOMY DESA.....	53
BAB IX IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART POLICE.....	59
BAB X PERAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA.....	65
BAB XI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENGENAI LINGKUNGAN MELALUI SMART POLICY.....	77
BAB XII UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SMART POLICY SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SMART CITY	85
BAB XIII STRATEGI CERDAS DINAS KETENAGAKERJAAN CIAMIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN KETENAGAKERJAAN.....	93
BAB XIV PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK.....	102
BAB XV IMPLEMENTASI PROGRAM SMART PEOPLE DALAM MEMUJUDKAN SMART VILLAGE.....	108
BAB XVI MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CIAMIS	121

BAB I

OPTIMALISASI KEBIJAKAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN KOTA CERDAS

SUATU TINJAUAN IMPLEMENTATIF

PENDAHULUAN

Keberadaan kota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Namun demikian, semakin cepat dan besar pertumbuhan sebuah kota, maka cenderung semakin besar pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut. Berbagai isu dan permasalahan pembangunan perkotaan seperti Urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan secara signifikan, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, meningkatnya kemiskinan di perkotaan, kurangnya kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan, permasalahan perkotaan di eradesentralisasi, dan tingkat pertumbuhan antar kota yang belum berkembang menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Selain itu tata cara pelaksanaan jalannya pemerintahan saat ini harus menyesuaikan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan. Dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan harus dapat mengikuti perkembangan sosial masyarakat supaya kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan yang optimal dapat terpenuhi (RURU et al., 2019). Terkait berbagai permasalahan perkotaan tersebut, kemudian memunculkan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus tantangan untuk menemukan cara-cara yang "cerdas" dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan. Konsep *smart city* (kota cerdas) muncul sebagai alternatif instrumen yang inovatif dan mulai diterapkan pada kota-kota besar di seluruh dunia. Dalam *smart city* juga kota dituntut untuk memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengatur kehidupan perkotaan. Saat ini konsep *smart city* mulai diterapkan oleh beberapa Kota di Indonesia.

Dalam era transformasi digital, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satunya cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah tersebut, masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh

pemerintah. Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum (hidayat, 2007). *Open Goverment Partnership* adalah keterbukaan informasi dari pemerintah untuk masyarakat. Dalam sistem OGP semua informasi yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan yang difungsikan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam memantau keuangan negara atau daerah. *Open Goverment Partnership* sejalan dengan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas (Dinas Kominfo, 2017).

Maka dari itu konsep *smart city* menjadi kunci untuk membangun kota yang transparan, responsif, efisien, dan berkelanjutan. Dinas PUPRP sebagai bagian integral dari pemerintahan kota memiliki peran penting dalam mewujudkan visi ini. Dimana konsep *Smart City* memperkaya proses perumusan kebijakan dengan menyediakan data real-time dan analisis yang mendalam. Dinas PUPRP dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, seperti sensor kota, sistem transportasi, dan partisipasi masyarakat, untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan perkotaan. Selain itu *Smart City* mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan. Dinas PUPRP dapat memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan masukan warga, memberikan transparansi, dan menghasilkan kebijakan yang lebih berdasarkan kebutuhan riil warga kota.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Menurut Grindle (1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk

mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi)pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Konsep *Smart city*

Menurut Pratama (2014), *smart city* merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu

daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya.

Sedangkan menurut Cohen (2014), *smart city* adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.

Menurut Muliarto (2015), *smart city* adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni.

Karakteristik *Smart City*

Menurut Hao, Lei dan Yan (2012), terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri smart city, yaitu:

1. Interkoneksi antara bagian perkotaan, *smart city* menggabungkan antara *communication network*, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud.
2. Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.
3. Manajemen perkotaan dan kerja sama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik.
4. Aplikasi ICT (*Information and Communication Technology*) terbaru, smart city teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.

Konsep *Smart Policy*

Menurut Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Smart Policy atau kebijakan yang cerdas adalah realitas yang sangat rumit, karena berisi segala bentuk keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat dan keputusan-keputusan tersebut diharapkan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi. Padahal, *Smart Policy* merupakan basis keunggulan pemerintahan sehingga dalam setiap pengambilan kebijakan, seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan publik unggul dengan memenuhi tiga syarat utama, diantaranya bersifat cerdas, bijaksana dan memberi harapan.

Smart Policy atau kebijakan yang cerdas adalah satu bagian dari terwujudnya Smart City. Yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. *Smart Policy* diharapkan mampu menjadi penghubung antara tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang tepat, *Smart Policy* merupakan salah satu dimensi dari Smart City.

Smart Policy atau kebijakan yang cerdas merupakan kebijakan publik yang langsung mengenai terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Adapaun bersifat bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak memikat serta kebijakan tersebut memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Sasaran dari *Smart Policy* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart Policy* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Efisiensi Kebijakan Publik yang cerdas (*smart policy public*) Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Dengan Sistem informasi kebijakan pemerintah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan perencanaan *smart city* dengan peningkatan kualitas *smart policy* yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi

informan dalam penelitian ini adalah Kepala dan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis telah menerapkan beberapa konsep *Smart City* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam mendorong terwujudnya *Smart City* oleh Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis, diadakan kegiatan Bimtek atau Bimbingan Teknis mengenai *Smart City*. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu program pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan/ Perundangan yang berlaku, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pendidikan. Selain itu, Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis berfokus terhadap penunjang ataupun *Supporting System* dalam mewujudkan Konsep *Smart City* salah satunya terhadap *Smart Living* di Kabupaten Ciamis. *Smart Living* sendiri merujuk pada bagaimana Dinas PUPRP dapat memberikan layanan ataupun Infrastruktur yang dapat memberikankemudahan terhadap masyarakat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi berbagai bidang program, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Bina Marga, dengan Program Penyelenggaraan Jalan, kegiatannya adalah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Bidang Keciaptakaryaan, dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi,
4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah.

Adapun dalam menjalankan tugas pokok atau urusan wajib bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yaitu dalam fungsi pelaksanaan kebijakan, Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis telah menerapkan konsep *Smart Policy*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yoga Risyana, ST selaku Kabid Perencana Ahli Muda yaitu dapat diketahui bahwa dalam mendukung terwujudnya *Smart City* di Kabupaten Ciamis, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis telah terintegrasi dengan aplikasi “Hello Ciamis”, yang mana aplikasi tersebut disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Diskominfo Kabupaten Ciamis guna mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah ataupun salah satunya terhadap infrastruktur yang diberikan. Dimana infrastruktur tersebut menjadi sebuah tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan fungsinya sebagai Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan dan fungsi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya. Sehingga dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakannya, Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis memberikan ruang terhadap masyarakat ataupun pihak swasta untuk dapat berpartisipasi dalam menjaga dan melaporkan temuan berkaitan dengan infrastruktur yang ada di lapangan.

PENUTUP

Smart Policy merupakan pengembangan dari konsep Smart City yang menekankan pada peningkatan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintah, dan efisiensi kebijakan publik melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Konsep ini mewujudkan kebijakan cerdas yang memiliki tiga syarat utama: kecerdasan, kebijaksanaan, dan memberi harapan.

Kecerdasan (Intelligence): Smart Policy menggunakan data dan informasi yang diperoleh melalui teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Penerapan sistem informasi kebijakan pemerintah memungkinkan akses mudah masyarakat terhadap peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah, serta memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan real-time.

Kebijaksanaan (Wisdom): Kebijakan yang cerdas harus bersifat bijaksana, adil, dan memberi harapan kepada masyarakat. Ini berarti kebijakan tersebut harus mampu mengatasi permasalahan inti dalam masyarakat, memotivasi perubahan positif, dan memberikan harapan bagi perbaikan. Sifat bijaksana ini mencerminkan tujuan dari Smart Policy untuk meningkatkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Memberi Harapan (Hope): *Smart Policy* diarahkan untuk memberikan harapan kepada masyarakat agar dapat menjadi lebih baik. Melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Aspek memberi harapan ini mencakup pengambilan kebijakan yang mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.

Dengan demikian, Smart Policy tidak hanya menjadi dimensi penting dari konsep *Smart City*, tetapi juga menjadi landasan untuk mencapai tujuan perkotaan yang lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, integrasi antara kebijakan yang cerdas dan teknologi informasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan warganya. Pertumbuhan perkotaan yang pesat membawa dampak besar, termasuk isu urbanisasi, penurunan kualitas lingkungan, dan permasalahan terkait pengelolaan. Dalam menghadapi tantangan ini, konsep *smart city* muncul sebagai solusi inovatif dengan fokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Selain itu, transparansi dalam pemerintahan dan penerapan kebijakan cerdas (*smart policy*) menjadi kunci untuk mencapai perkotaan yang responsif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiah, E. T. (2017). Rancangan Aplikasi Smart City Berbasis Mobile Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Studi Kasus Pemkot Bogor. *Jurnal Teknik Komputer*, 3(1), 24-29.
- Dewanti, M., Purnomo, EP, & Salsabila, L. (2020). Analisis efektivitas bank sampah sebagai alternatif pengelolaan sampah dalam mewujudkan smart city di kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5 (1), 21-29.
- Fauzi, AN, & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Kota Cerdas Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik*, 7 (4), 356-374.
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*.
- L. Hao, X. Lei, Z. Yan and Y. ChunLi, "The application and implementation research of smart city in China," *2012 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)*, Dalian, China, 2012, pp. 288-292, doi: 10.1109/ICSSE.2012.6257192.

- Pangestu, DK, & Anggraini, W. (2022). Strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan smart city melalui smart Government di Kota Serang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10 (2), 130-141.
- Soetarto, H. (2022). SMART CITY: KONSEP KOTA CERDAS ERA KONTEMPORER (STUDI KEBIJAKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP). *PUBLIC CORNER*, 17(1), 88-104.
- Suprastiyo, A. (2019). Implementasi Program Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 1-7.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

BAB II

TRANSFORMASI PERKOTAAN KE ERA INDUSTRI 4.0

IMPLEMENTASI KONSEP SMART LIVING SEBAGAI SOLUSI TERHADAP DISRUPSI TEKNOLOGI DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya berdampak pada pola hidup saat ini, fenomena aktifitas nyata menjadi aktifitas digital yang sifatnya cenderung maya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di era industri 4.0. Dampaknya, disrupsi teknologi tak bisa dihindari dalam pola hidup masyarakat. Hal tersebut juga telah disadari oleh berbagai sektor agar berinovasi dan melakukan pengembangan dalam menghadapi disrupsi teknologi saat ini, begitupun dalam bidang perencanaan wilayah dan kota yang telah banyak mengandalkan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Smart city merupakan sebuah konsep dalam perencanaan wilayah dan kota yang mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tatanan kehidupan di suatu wilayah. Konsep ini juga dipercaya dapat menjadi strategi pemerintah Kabupaten/Kota agar terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam urusan perencanaan wilayah dan kota khususnya pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi karena mampu menjawab permasalahan dari berbagai sektor di bidang perencanaan wilayah dan kota. *Smart city* merupakan salah satu strategi pengelolaan dan pengembangan kota baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan waktu dan teknologi. *Smart city* adalah konsep kota pintar yang dirancang untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, konsep *smart city* juga dihadirkan sebagai respon terhadap pengelolaan sumber daya yang efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen (2012) bahwa *smart city* adalah entitas menyeluruh yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional kota, kualitas hidup penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal. Terdapat 6 (enam) dimensi dalam konsep smart city beserta dengan indikator yang mendukung terwujudnya smart city. Dimensi tersebut diantaranya yaitu: *Smart Government* (Pemerintahan Cerdas), *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas), *Smart People* (Masyarakat Cerdas), *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), *Smart Living* (Kehidupan Cerdas). *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada *smart living*. *Smart Living* adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk

meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektifitas dan efisien kerja dibalik design interior yang menarik pada suatu ruang kerja.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari konsep *smart living* adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam ruang kerja, menambah nilai estetika ruang kerja, meningkatkan efisien konsumsi energi listrik dengan sistem kendali dan tata cahaya (*Lighting control system*) dalam ruang kerja. Meski saat ini konsep smart living belum banyak diadopsi industri perkantoran, namun konsep tersebut diprediksi akan menjadi tren. Hal ini terbukti dari laporan Dell and Intel Future Workforce Study 2016, yang mengungkap hampir separuh pekerja (45 persen) di wilayah Asia Pasifik dan Jepang (API) berharap dalam lima tahun ke depan, mereka dapat bekerja di sebuah smart office yang menawarkan *Internet of Things* (IoT) dan berbagai teknologi lainnya seperti *Artificial Intelligence* (AI).

Namun, dengan adanya *smart living* pada lingkungan perkantoran, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan seperti memastikan teknologi yang ditawarkan dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Selama ini, banyak waktu terbuang sia-sia selama bekerja karena program software dan perangkat yang lambat atau sering mengalami glitch. Selain permasalahan terkait software, perusahaan besar juga perlu berantisipasi dalam kelemahan yang akan ditimbulkan dari konsep *smart living* seperti kemunculan penjahat siber atau hacker. Hacker sendiri adalah seorang individu atau sekelompok individu yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos (memaksa) masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Sistem *smart living* menggunakan jaringan nirkabel dan IoT sehingga dapat dengan mudah menjadi sasaran para peretas kelas atas. Ancaman ini dapat menyerang mereka dengan cara tidak terduga, bahkan perangkat yang tampak tidak berbahaya dapat berubah menjadi mesin kuat untuk menjalankan aktivitas ilegal.

Smart Living merupakan dimensi Smart City yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Smart Living terdiri atas tiga indikator unsur yang terdiri atas: 1. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang selaras dan layak (Harmoni), 2. Membangun Prasarana Kesehatan (Kesehatan), 3. Menjamin Ketersediaan Sarana.

KAJIAN TEORITIS

1. Definisi *Smart City*

Smart city atau kota cerdas adalah suatu rancangan dari perkembangan kota terkhususnya kota yang sedang berkembang. Pertumbuhan rancangan *smart city* memiliki arti yang berbeda dari beberapa pihak. Pengertiannya tidak hanya pada faktor tunggal namun memiliki arti serta pembahasan dari berbagai perspektif yang

dipergunakan sebagai dasar. Konsep kota cerdas dapat diambil pemahamannya dengan cara melihat dan me-resume karakteristik yang tepat untuk sebuah kota cerdas yang cenderung umum dari beberapa sumber. *Smart city* merupakan rancangan kota dengan penggunaan teknologi untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pendapat menyatakan rancangan *smart city* bisa menjawab dari keperluan masyarakat sekarang dalam keringanan dari sisi hidup serta kesehatan, namun rancangan *smart city* ini sedang mengalamii perbedaan pendapat dari para ahli serta belum ada pengertian dan perancangan umum yang dapat digunakan oleh seluruh kota didunia. Rancangan dari *smart city* ini masih didasari dari kota serta perkembangannya.

Beberapa para ahli mencoba mendefenisikan *smart city* dengan definisi yang berbeda, hal itu didasarkan dari sudut pandang ilmu masing-masing. *Smart city* adalah peningkatan dan penataan kota dengan memanfaatkan teknologi agar dapat mengerti, pemahaman, serta pengendalian dari berbagai sumber daya dari suatu kota secara efektif dan juga efisien. Hal ini diharapkan agar pelayanan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang terus menerus dalam dimaksimalkan (Supangkat, 2015). Sedangkan menurut (Agus Eka Pratama, 2014) *smart city* atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang kompleks diantara berbagai sistem yang ada didalamnya. Rancangan awal dari *smart city* adalah "*information city*" yaitu penggunaan ICT yang menjadi media utama dari perancangan suatu kota yang di anggap cerdas. Sebuah kota yang terhubung antara prasarana fisik, prasarana teknologi, prasarana sosial dan prasarana bisnis agar tersedia pelayanan masyarakat yang berbasis prasaran teknologi untuk masyarakat. Menurut Cohen (2013) pada "*What Exactly Is A smart city*", *smart city* terdiri dari enam indikator utama, yaitu: *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Enviroment*, *Smart Governance*, *Smart Living* dan *Smart Mobility*. Keenam indikator tersebut menjadi kunci dari terbentuknya konsep *smart city*.

2. Dimensi Smart City

Menurut Giffinger (2007), terdapat 6 (enam) dimensi dalam konsep *smart city* beserta dengan indikator yang mendukung terwujudnya *smart city*. Dimensi tersebut diantaranya yaitu:

1. Smart Government (Pemerintahan Cerdas)

Smart Government melingkupi bidang kontribusi politik serta layanan publik dari sisi administrasi. Dengan aspek yang ada didalamnya, seperti kontribusi dalam pengambilan keputusan, pelayanan umum dan sosial, pemerintahan yang transparan, layanan online, sarana dan prasarananya.

2. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Smart environment dirancang karena kondisi alam seperti polusi, iklim dan lain-lain yang ditujukan untuk pemeliharaan lingkungan. Dengan faktor-faktor yang ada pada lingkungan cerdas yaitu seperti daya tarik kondisi alamnya, polusi, perlindungan lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

3. *Smart People* (Masyarakat Cerdas)

Masyarakat cerdas tidak hanya dideskripsikan oleh tingkat kualifikasi atau pendidikan dari masyarakatnya, namun juga dilihat dari kualitas interaksi sosial mengenai kehidupan publik dan keterbukaan terhadap dunia luar. Faktor-faktor yang ada didalamnya seperti tingkat kualifikasi, daya tarik untuk belajar sepanjang hayat, etnis sosial dan pluralitas, fleksibilitas, kreativitas, keterbukaan pikiran/pendapat, serta partisipasi dalam kehidupan publik.

4. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

Ekonomi cerdas termasuk di dalamnya faktor-faktor seputar kompetisi ekonomi sebagai inovasi, kewirausahaan, merek dagang, keproduktifan, dan fleksibilitas dari sisi pasar tenaga kerja serta penggabungan dalam pasar internasional. Dengan faktor-faktor seperti semangat berinovasi, kewirausahaan, citra ekonomi dan merek dagang, produktivitas, fleksibilitas dari pasar tenaga kerja, serta kemampuan untuk melakukan perubahan,

5. *Smart Living* (Kehidupan Cerdas)

Kehidupan cerdas meliputi berbagai aspek dari kualitas hidup sebagai budaya, kesehatan, keselamatan, perumahan, pariwisata, dan lain-lain. Dengan faktor-faktornya antara lain fasilitas budaya, kondisi kesehatan, keselamatan individu, kualitas perumahan, fasilitas pendidikan, daya tarik wisata, dan keterpaduan sosial.

6. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Mobilitas cerdas memiliki aspek penting yaitu aksesibilitas lokal dan internasional yang sama baiknya dengan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi dan modern serta sistem transportasi yang berkelanjutan. Dengan faktor-faktor yang terdapat pada mobilitas cerdas antara lain aksesibilitas lokal dan internasional, ketersediaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem transportasi yang berkelanjutan, inovatif, dan aman.

3. *Smart Living*

Smart Living merupakan dimensi *Smart City* yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Smart Living terdiri atas tiga indikator unsur yang terdiri atas, mewujudkan tata ruang wilayah yang selaras dan layak, membangun prasarana kesehatan dan

menjamin ketersediaan sarana. *Smart living* adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektifitas dan efisien kerja dibalik design interior yang menarik pada suatu ruang kerja. Konsep tersebut dapat berupa integrasi aneka peralatan elektronik di ruang kerja/kantor (seperti *PC/laptop, Printer, Slide projector, TV, Audio system, Phone/Voice/Fax*, dan sebagainya) ke dalam satu akses produk berupa *Table-desktop socket systems*, dan atau *floor socket systems*. Dengan tujuan untuk menghadirkan rasa aman karena terintegrasi pada sensor pendeteksi api dan cctv sebagai sistem pengawasan atau pemantauan baik barang ataupun pekerja.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari konsep *smart living* adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam ruang kerja, menambah nilai estetika ruang kerja, meningkatkan efisien konsumsi energi listrik dengan sistem kendali dan tata cahaya (*Lighting control system*) dalam ruang kerja. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi karyawan dalam bekerja karena di dukung dengan perlatan teknologi seperti *PC/laptop, Printer, Slide projector, TV, Audio system, Phone/Voice/Fax*, dan sebagainya).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Selain melakukan wawancara juga melakukan observasi dan dokumentasi. Dimana observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan serta pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap penting, observasi ini dilakukan secara langsung di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH). Dan yang terakhir dengan menggunakan dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart Living merupakan dimensi *Smart City* yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan tiga elemen yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas. Smart Living terdiri atas tiga indikator unsur yang terdiri atas, mewujudkan tata

ruang wilayah yang selaras dan layak, membangun prasarana kesehatan dan menjamin ketersediaan sarana.

Smart living adalah sebuah konsep dibalik design interior yang menarik pada suatu ruang kerja. Konsep tersebut dapat berupa integrasi aneka peralatan elektronik di ruang kerja/kantor (seperti *PC/laptop, Printer, Slide projector, TV, Audio system, Phone/Voice/Fax*, dan sebagainya) ke dalam satu akses produk berupa *Table – desktop socket systems*, dan atau *floor socket systems*. Dengan tujuan untuk menghadirkan rasa aman karena terintegrasi pada sensor pendeteksi api dan cctv sebagai sistem pengawasan atau pemantauan baik barang ataupun pekerja.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Sesuai dengan peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

Konsep smart living yang dapat diperoleh masyarakat dalam sebuah kota yaitu, kesehatan, perumahan, aksesibilitas, persampahan, energi, keanekaragaman hayati, air, teknologi dan transportasi. Adapun pendorong utama dari konsep *smart living* yaitu: akses yang berkualitas tinggi terhadap layanan kesehatan (*e-health, remote health monitoring*), manajemen *electronic health record*, Otomasi rumah, rumah cerdas dan layanan *smart building*, serta akses terhadap berbagai jenis layanan sosial.

Adanya konsep smart living tersebut dapat meningkatkan produktivitas karyawan terutama di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Karena konsep ini dapat mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektifitas dan efisien kerja karyawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang dapat disimpulkan bahwa, *smart living* adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektifitas dan efisien kerja dibalik design interior yang menarik pada suatu ruang kerja.

Terdapat 6 (enam) dimensi dalam konsep *smart city*. Dimensi tersebut diantaranya yaitu: *Smart Government* (Pemerintahan Cerdas), *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas), *Smart People* (Masyarakat Cerdas), *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), *Smart Living* (Kehidupan Cerdas). *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas).

Dan juga konsep smart living dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Karena konsep ini dapat mengintegrasikan aneka peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja atau kantor dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta meningkatkan efektifitas dan efisien kerja karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Smart city, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127-135.
- Jayanti, A. V., Purnomo, E. P., & Nurkasiwi, A. (2020). Vertical garden: penghijauan untuk mendukung smart living di Kota Yogyakarta. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 41-54.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 126-138.
- Nurfauzia, M., & Syaodih, E. (2020). Kajian Implementasi Program Smart City pada Dimensi Smart Government Smart Living dan Smart Environment di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(2), 367-374.
- Ridho, M. F., & Kurniasari, N. (2023). Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan Tangerang. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 9-16.
- Setyowati, K., Susiloadi, P., & Suryawati, R. (2019). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PDAM DALAM MEWUJUDKAN SMART LIVING. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 16-25.
- .

BAB III

MEMBANGUN SMART PEOPLE UNTUK SMART CITY

PERAN PEMERINTAHAN DALAM MENGHADIRKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS DALAM ERA DIGITAL

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik di ranah pemerintahan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi salah satu motor utama dalam transformasi ini. Seiring dengan inovasi yang terus berkembang, setiap instansi pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk mengikuti arus perkembangan tersebut. Dalam konteks ini, pemanfaatan TIK tidak hanya diperlukan untuk mengikuti perkembangan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemanfaatan TIK telah meresap dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu, keluarga, organisasi, hingga masyarakat secara luas. Kemajuan teknologi tersebut tidak hanya terlihat dalam penggunaan perangkat keras seperti komputer dan smartphone, tetapi juga dalam aplikasi perangkat lunak yang semakin canggih dan tersedianya akses internet yang semakin luas. Dampaknya, pola hidup masyarakat telah berubah secara signifikan, di mana aktivitas nyata cenderung bertransformasi menjadi aktivitas digital yang bersifat maya. Salah satu konsep yang tengah berkembang adalah konsep Smart City.

Konsep ini menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam merancang dan mengelola tatanan kehidupan di suatu wilayah. Dalam konteks Smart City, konsep Smart People menjadi salah satu dimensi utama. Smart People mengacu pada kebutuhan akan sumber daya manusia yang cerdas dan didukung oleh kebijakan serta infrastruktur yang cerdas pula. Untuk mencapai tujuan Smart City, keberadaan Smart People menjadi krusial. Smart People tidak hanya merujuk pada tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga pada kemampuan individu untuk beradaptasi dengan teknologi, berinovasi, dan berkolaborasi secara efektif. Seiring dengan itu, infrastruktur dan kebijakan di berbagai sektor seperti mobility, governance, economy, dan environment juga perlu didesain secara cerdas agar dapat mendukung terciptanya kualitas hidup yang diinginkan.

Kemunculan Smart City merupakan hasil dari kombinasi berbagai modal, salah satunya adalah modal sumber daya manusia. Modal sumber daya manusia dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada angkatan kerja terdidik, tetapi juga meliputi ketersediaan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif. Selain itu, modal infrastruktur,

sosial, dan entrepreneurial juga turut berperan dalam membentuk ekosistem Smart City yang berkelanjutan. Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya memegang peran penting dalam membentuk Smart People. Melalui kebijakan yang mendukung pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang merangsang inovasi dan kreativitas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dan aksesibilitas yang luas agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Meskipun konsep Smart People menjadi kunci dalam pembangunan Smart City, namun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai daerah. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan inklusivitas dalam penggunaan TIK. Selain itu, tantangan lainnya termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat. Dalam pandangan Kourtit & Nijkamp (2012), keberadaan Smart People yang kreatif dan berpikiran terbuka dapat meningkatkan produktivitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kota. Melalui inovasi dan kolaborasi, Smart People dapat menciptakan peluang-peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi.

Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap teknologi juga memungkinkan terciptanya bisnis-bisnis kreatif yang berkontribusi pada dinamika ekonomi lokal. Dalam era di mana teknologi menjadi pendorong utama transformasi, penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan potensi TIK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan Smart City. Smart People menjadi kunci dalam mewujudkan konsep Smart City, dengan memastikan adanya sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, dan mampu berkolaborasi secara efektif. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan pembangunan Smart City dapat menjadi realitas yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Smart People

Smart people atau masyarakat cerdas yaitu modal manusia yang berpendidikan baik secara formal maupun non formal dan terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas yang kreatif. Salah satu karakter yang menjadi prioritas dalam smart city adalah karakter smart people yang merupakan aktor utama yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan. Pembentukan smart people atau masyarakat cerdas dapat diupayakan dengan mengoptimalkan pendidikan formal

dan non formal masyarakat serta pembinaan keberadaan komunitas-komunitas kreatif.

Giffinger (2007) menyebutkan ada beberapa faktor yang penting dalam karakter ini, yaitu meliputi:

- a. *Level of qualification* (tingkat kualifikasi).
- b. *Affinity to long life learning* (keinginan untuk pembelajaran seumur hidup).
- c. *Social and ethnic plurality* (keberagaman sosial dan budaya).
- d. *Flexibility* (fleksibilitas).
- e. Creativity (kreativitas).
- f. *Cosmopolitanism/open mindedness* (keterbukaan), dan
- g. *Participation in public life* (partisipasi masyarakat).

2. Smart City

Pada penelitian yang dilakukan oleh Caragliu et al (2011) Smart City dimaknai sebagai kota yang menerapkan sumber daya manusia, modal sosial, serta prasarana telekomunikasi modern guna mewujudkan kemajuan ekonomi terus menerus dan karakteristik kehidupan yang maju, dengan pengelolaan sumber daya yang bijak dengan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.

Menurut (Cocchia, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Cohen (2013) memberikan definisi Smart city sebagai metode yang luas, terintegrasi dalam peningkatan kinerja operasi suatu 7 kota, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengembangkan perekonomian di daerahnya. Cohen selanjutnya menyimpulkan Smart city menerapkan penilaian perspektif lingkungan sehingga Smart city menerapkan ICT dengan pintar serta efisien dalam penggunaan pelbagai sumber daya, mendatangkan pemerataan biaya dan energi, memajukan kualitas pelayanan masyarakat, dan mereduksi pencemaran lingkungan karena adanya inovasi untuk ramah lingkungan.

3. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Wawancara tersebut meliputi Perangkat Desa Pawindan. Selain melakukan wawancara juga melakukan observasi dan dokumentasi. Dimana observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan serta pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap penting, observasi ini dilakukan secara langsung ke Perangkat Desa Pawindan. Dan yang terakhir dengan menggunakan dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Smart People* Dalam Pengembangan *Smart City* Di Desa Pawindan dalam sistem informasi desa. Hasil analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bidang-bidang utama yang perlu diperhatikan dalam membangun desa pintar, seperti tata kelola pemerintah, ekonomi desa, lingkungan desa, sumber daya energi, sumber daya manusia, TIK, petani desa, dan pariwisata.

Smart People (masyarakat cerdas) sangat dipengaruhi oleh terbentuknya karakter generasi muda yang baik, salah satunya melalui peran Pendidikan Agama Islam. Selain *Smart People*, *Smart City* juga didukung oleh beberapa komponen yakni *Smart Governance*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart Economy* dan *Smart*

Living. Sehingga hal ini mendukung program *Smart City* yang tidak lepas dari indeks pembangunan manusia. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pawindan telah bisa mendukung *Smart City* tersebut karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Pawindan. Indeks pembangunan manusia tertinggi di Desa Pawindan dan telah melebihi nilai yang ditentukan oleh pusat.

Dalam smart city menghadapi berbagai permasalahan bisa menggunakan kemajuan teknologi atau tidak. Semua berhasil harus terlebih dahulu memahami pengertian dari Smart city tersebut. Dimana Smart City itu adalah sebuah konsep kota yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, lembaga di dalam untuk melakukan kegiatan atau mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Yang terpenting dalam mewujudkan Smart City tersebut harus didukung oleh semua komponen masyarakat. Dengan cara ikut berpartisipasi, menjaga pluralitas etnik maupun sosial serta memiliki pemikiran yang open minded.

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Mulyati selaku Sekdes di Desa Pawindan, dengan topik mengenai bagaimana penerapan *smart people* dalam mengembangkan *smart city* di Desa Pawindan.

Dan juga melakukan wawancara dengan aparatur desa yaitu dengan kasi perencanaan, dan kasi pemerintahan. Selain itu, mewawancarai kelompok tani wanita dan masyarakat di Desa Pawindan yang sedang melakukan kerja bakti.

Menurut salah satu masyarakat mengenai penerapan *smart people* dalam pengembangan smart city sudah diterapkan dengan baik dan optimal. Sarana dan prasarana pun sudah memadai tetapi ada beberapa masyarakat yang memang belum memiliki fasilitas pribadi yang dapat menunjang mendapatkan informasi seperti (HP), dan tidak semua masyarakat di Desa Pawindan mengerti perihal teknologi IT contohnya bagi masyarakat lansia.

Sehingga ini menjadi sebuah tantangan untuk aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang baik secara adil dan merata kepada masyarakat desa Pawindan Kecamatan Ciamis.

Terutama di dalam Pemerintahan desa yaitu desa Pawindan Kecamatan Ciamis merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Ciamis, yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangrasa di sebelah utara, Kabupaten Tasikmalaya di sebelah selatan, Kelurahan Linggasari di sebelah timur, dan Desa Panyingkir di sebelah barat. Luas Wilayah Desa Pawindan yaitu 206,03 Ha.